

ARTIKEL

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PNPM MANDIRI TAHUN 2010-2011 DI KELURAHAN MUGASARI

Oleh :

Dian Ristika, Endang Larasati, M.Suryaningsih

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jl. Profesor Haji Sudarto, Sarjana.Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

National Community Empowerment Program is a national program of poverty reduction mainly based community empowerment. Indonesia has the problem of poverty and unemployment. Poverty in Indonesia can be seen from the three approaches, namely natural poverty, structural poverty, and the gap between region. Problem be triggered by low unemployment and employment opportunities for the labor force in urban. effort to mitigate them should use a multi-tiered approach discipline. Pemberdayaan proper dimension should incorporate aspects awareness aspects.

National Program for Community Empowerment (PNPM Mandiri) empowerment-based course provides a space for people to be directly involved in addressing the problems of poverty, from the planning phase, the determination of the program, implementation, monitoring and evaluation.

The general purpose of the National Program for Community Empowerment-Self is to improve the welfare and employment opportunities for the poor in mandiri. Dan specifically intended that the people in the village improvement program participants can enjoy the social, economic, and local governance.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di

Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di pedesaan. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi

disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran aspek-aspek.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang berbasis pemberdayaan tentu saja memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, mulai dari tahap perencanaan, penentuan program, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi.

Adapun tujuan umum dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin secara mandiri. Dan secara khusus bertujuan agar masyarakat di kelurahan peserta program dapat menikmati perbaikan sosial, ekonomi, dan tata pemerintahan lokal.

Pemerintah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan tidak hanya memberikan bantuan berupa dana, namun juga memberikan pendampingan agar masyarakat dapat lebih meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan dalam rangka merubah paradigma, sikap, dan perilaku masyarakat agar dapat menanggulangi masalah kemiskinan secara mandiri, itu akan menjadi proses pembelajaran bagi masyarakat. Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Pedesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

B. TUJUAN

- Mengetahui gambaran secara jelas bagaimana implementasi pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.
- Mengetahui peranan Aktor terkait dalam mensosialisasikan Program PNPM di Kelurahan Mugasari Kecamatan Semarang Selatan.
- Mengetahui Hasil Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.

C. TEORI

Teori yang digunakan adalah :

1. Kebijakan Publik

James Anderson mendefinisikan kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang

ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan (Riant Nugroho, 2006 : 23).

Untuk lebih jelasnya, secara lebih sederhana siklus kebijakan publik dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

a. Formulasi Kebijakan (Perumusan Kebijakan)

Perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan publik, karena disini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri. Ini merupakan suatu permulaan dari kebijakan.

b. Implementasi Kebijakan

Dalam kelompok ini terdapat kegiatan yang mengarah pada proses pelaksanaan kebijakan. Dalam praktik implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat kompleks, sering bernuansa politis dan memuat adanya intervensi kepentingan.

c. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi atau unit kerja dalam melakukan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses pencapaian tujuan seperti yang telah digarisbesarkan dalam keputusan melalui tindakan – tindakan yang dilakukan oleh individu – individu atau pejabat – pejabat kelompok pemerintah dan swasta.

Faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George Edwards III sebagai berikut :

a. Komunikasi

Persyaratan utama bagi komunikasi yang efektif ialah bahwa para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang mereka kerjakan. Keputusan – keputusan kebijakan dan perintah – perintah penerapan harus disalurkan kepada orang – orang yang tepat, sehingga komunikasi harus akurat dan secara akurat diterima oleh para pelaksana.

b. Sumber – sumber daya

Perintah – perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber – sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan – kebijakan, maka implementasi pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber – sumber dapat merupakan faktor yang dalam melaksanakan kebijakan publik.

c. Sikap / Kecenderungan

Sikap – sikap juga merupakan faktor yang amat penting untuk suksesnya implementasi. Jika pelaksana berpandangan positif terhadap suatu kebijakan, maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan. Tetapi bila sikap atau perspektifnya berbeda,

maka proses implementasi menjadi terancam kesuksesannya.

3. **Komunikasi**
Menurut T. Hani Handoko (2003:272) komunikasi merupakan proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Perpindahan pengertian tersebut melibatkan lebih dari sekedar kata – kata yang digunakan dalam percakapan, tetapi juga ekspresi wajah, intonasi, titik putus vokal dan sebagainya. Tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan antara lain:
 - a. Transmisi
 - b. Kejelasan
 - c. Konsistensi
4. **Sumberdaya**
Menurut Ginanjar Kartasasmitra (1997:54) memberikan pengertian bahwa sumber daya pada pokoknya berupa dana (modal), sumber daya manusia, teknologi dan organisasi atau kelembagaan. Di dalam hal ini dana bersumber dari pemerintah dan masyarakat. Perlu juga disiapkan SDM yang cukup (kuantitas) dan berkualitas untuk dapat memenuhi kebutuhan pembangunan. Sumber – sumber daya penting dalam implementasi kebijakan yang efektif menurut Edwards (Tangkilisan, 2003:55) terdiri dari :
 - a. Staf,
 - b. Informasi yang memadai,
 - c. Wewenang untuk mengontrol pelaksanaan kebijakan, pembuatan keputusan dan penetapan sanksi.

d. Fasilitas.

5. **Sikap Pelaksana Kebijakan**
Sikap merupakan seperangkat pendapat, minat, atau tujuan yang menyangkut harapan akan suatu jenis pengalaman tertentu, dan kesediaan dengan suatu reaksi yang wajar. Sedangkan Gibson (1993:57) mendefinisikan sikap sebagai berikut “Sikap adalah kesiapsiagaan mental, yang dipelajari dan diorganisasikan melalui pengalaman dan mempunyai pengaruh tertentu atas cara tanggap seseorang terhadap orang lain, objek dan situasi yang berhubungan dengannya.”

D. METODE

1. Desain Penelitian menggunakan tipe Penelitian Deskriptif.
2. Lokasi dan Fokus Penelitian
 - ▣ lokus penelitian di Kelurahan Mugasari Kecamatan Semarang Selatan.
 - ▣ Fokus Implementasi Kebijakan PNPM Tahun 2010-2011 di Kelurahan Mugasari.
3. Sumber Data
Sumber data menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunde
4. Instrumen penelitian
menggunakan peneliti sebagai instrumen penelitian, interview guide, informan
5. Tehnik penentuan informan penelitian
menggunakan snowball sampling
6. Tehnik pengumpul data
dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka
7. Tehnik analisis data
menggunakan tehnik analisis data domain dan analisis data taksonomi

PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Mekanisme Pelaksanaan Program

Hasil *interview* yang dilakukan oleh peneliti dilihat dari koordinasi yang dilakukan oleh BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Mugasari dalam pelaksanaan Program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) ke masyarakat miskin khususnya adalah warga Kelurahan Mugasari. Pemberian bantuan diberikan oleh BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) bertujuan untuk membuat masyarakat yang kurang mampu dapat secara mandiri untuk dapat memperbaiki kehidupan ekonomi mereka. Program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) ini dibuat Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin secara mandiri. Bantuan dalam program ini biasanya berbentuk pemberdayaan, disesuaikan juga dengan kebutuhan masyarakat di tiap daerah.

Identifikasi *stakeholder* yang potensial dalam artian memang sangat membutuhkan dan layak dibantu dalam Program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) memang harus dilakukan secara maksimal. Dimana dalam hal ini adalah tugas dari BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) di Kecamatan Semarang Selatan

dan di tingkat Kelurahan yang telah berkoordinasi untuk mengoptimalkan kebijakan tersebut sehingga bisa sampe ke target sasaran masyarakat pada program kebijakan ini. Pemerintah Pusat memberikan tugas ke setiap daerah, tingkat kecamatan adalah tingkatan paling bawah yang nanti akan memberikan tugas ke tingkat Kelurahan. Petugas BKM Kecamatan berkoordinasi langsung dengan BKM tingkat kelurahan. Tingkat kelurahan dapat disebut dengan ujung tombak dari program kebijakan PNPM ini karena di tingkat inilah BKM harus turun langsung dan mencari target sasaran dari program PNPM. Oleh Karena itu Kepala Kelurahan mengawasi langsung berjalannya Program PNPM. BKM ditingkat Kelurahan dipilih langsung oleh masyarakat dan nanti akan dibantu oleh LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) dan sukarelawan. Semua petugas itu masyarakatlah yang memilih seterusnya para petugas harus bekerja untuk mensosialisasikan dan membantu masyarakat dalam Program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat).

2 Tujuan Pelaksanaan Program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) di Kelurahan Mugasari Kecamatan Semarang Selatan

BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Kecamatan Semarang Selatan adalah pihak yang memberikan

tugas langsung kepada BKM Kelurahan Mugasari. Tujuan dari Program PNPM (Program Nasional Mandiri) khususnya di Kelurahan Mugasari ini untuk membuat masyarakat yang kurang mampu dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dengan bantuan pemberdayaan dari Pemerintah.

Pencapaian tujuan dari program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) ini belum maksimal karena dalam pelaksanaannya mengalami berbagai macam kendala, seperti masyarakat berpendidikan rendah masih belum memahami tujuan dari penerapan tersebut sehingga banyak terjadi kebingungan mengenai pelaksanaan program di Kelurahan Mugasari. Dari *interview* yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan informasi bahwa pada pelaksanaan razia yang dilakukan oleh Petugas BKM dan relawan di Kelurahan Mugasari, masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah tersebut yang kurang paham terhadap program dan kurangnya sosialisasi.

Sesuai dengan tujuan yang disebutkan pada buku *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan* bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Dengan demikian secara khusus tujuan PNPM dirumuskan "Masyarakat di Kelurahan peserta program menikmati perbaikan sosial ekonomi dan tata pemerintahan lokal". Adapun tujuan khusus

dari PNPM Mandiri adalah meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lain yang rentan dan sering terpinggirkan kedalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, juga untuk mengajak masyarakat merencanakan dan menyusun agenda pembangunan mereka sendiri.

Jadi dapat disimpulkan bahwa program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) ini mempunyai manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Manfaat yang dirasakan masyarakat antara lain dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian yang nantinya akan dimiliki oleh masyarakat kurang mampu di Kelurahan Mugasari Kecamatan Semarang Selatan melalui pemberdayaan ini. Pada pelaksanaan program kedepannya diharapkan agar masyarakat menggunakan sarana dengan baik dan mampu secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Karena tujuan kebijakannya adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

Peranan Aktor

Hasil *Interview* yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat koordinasi yang dilakukan oleh Petugas BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) di Kelurahan Mugasari Kecamatan Semarang

Selatan dalam pelaksanaan program PNPM kepada masyarakat selaku *target groups* atau sasaran kebijakan. Bapak Kepala Kelurahan Mugasari telah memberikan prioritas dan menjadi pelindung terhadap jalannya Program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) kepada masyarakat. Program ini bertujuan untuk memberikan pemberdayaan untuk masyarakat miskin untuk mampu mandiri meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk meningkatkan partisipasi dan pengetahuan masyarakat dapat dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengenalan program dilakukan oleh BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Kelurahan Mugasari Kecamatan Semarang Selatan. Dalam pelaksanaan program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), BKM Kecamatan Semarang Selatan telah memprioritaskan penerapan melakukan koordinasi yang tepat dengan seluruh BKM Kelurahan Mugasari dalam hal ini adalah LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) dan relawan. Relawan adalah bagian terbawah yang dapat mengoptimalkan program kebijakan PNPM di wilayah Kelurahan Mugasari. Koordinasi antara BKM dengan seluruh relawan dilakukan dalam hal mencapai standarisasi kebijakan program pemberdayaan sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.

Hasil

Program PNPM adalah Program mengentaskan kemiskinan warga di Kelurahan Mugasari Kecamatan Semarang Selatan. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi yang baik petugas agar seluruh anggotanya dapat bekerja dengan baik. Untuk memimpin gerakan perubahan penanggulangan kemiskinan disini adalah Program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan masyarakat mandiri) diperlukan pemimpin yang dapat diterima semua pihak yang tidak parsial, tidak mewakili golongan atau kelompok tertentu juga tidak mewakili wilayah tertentu. Pimpinan dan petugas ini juga harus dijaga untuk tidak jatuh dalam nafsu berkuasa yang bersifat otoriter tetapi tetap menjamin proses demokrasi dalam proses pengambilan keputusan.

Dari hasil *interview* yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan informasi kenyataan dilapangan para petugas biasa disebut BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) memang sudah bekerja untuk melayani masyarakat dengan baik. Tetapi masyarakat merasa informasi yang disampaikan kurang dapat diterima dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh model sosialisasi kemasyarakat yang sulit dipahami. Ditingkat kelurahan unsur utama pelaksanaan Program PNPM adalah Lurah dan perangkatnya, kemudian relawan masyarakat, LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat), KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dengan peran dan tugas masing-masing. Mereka saling bersinergi untuk mewujudkan tujuan yang sama yaitu memberikan pemberdayaan untuk masyarakat.

Tetapi kenyataan dilapangan masih banyak warga yang masuk dalam

target sasaran bantuan ini justru tidak menerima bantuan. Sosialisasi petugas yang dirasa kurang maksimal sehingga membuat warga kurang dapat bantuan secara merata.

PENUTUP

A. SIMPULAN

- Implementasi PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) di Kelurahan Mugasari Kecamatan Semarang Selatan ini jelas mempunyai banyak manfaat untuk masyarakat. Dengan kebijakan ini masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Selain itu masyarakat juga bisa lebih mandiri untuk memberdayakan kemampuannya sehingga akan berkelanjutan. Pada pelaksanaan program kedepannya diharapkan agar masyarakat menggunakan sarana dengan baik dan mampu secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Karena tujuan kebijakannya adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.
- Sebagai Aktor Kebijakan Komunikasi adalah sarana yang paling berpengaruh terhadap penentuan hasil berhasil atau tidaknya program ini. Dalam Implementasi Kebijakan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri koordinasi antara BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dengan LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) dan para relawan

harus satu tujuan. Dimana tujuannya adalah menolong masyarakat yang kurang mampu yang menjadi sasaran program ini untuk mengerti segala sesuatu tentang program. Para petugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengerti tentang program kebijakan ini. Tetapi kenyataan di lapangan berbeda padahal komunikasi yang baik adalah yang bersifat *top down*. Informasi dari atas mampu disampaikan dengan baik ke warga masyarakat yang masuk dalam daftar warga miskin dan berhak menerima bantuan. Kebanyakan Petugas BKM Kelurahan Mugasari jarang yang ditemui langsung terjun ke Masyarakat. Sehingga sosialisasi kurang mampu mengena dengan baik.

- Struktur birokrasi yang baik akan mempermudah jalannya Implementasi PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri di Kelurahan Mugasari. Karena dengan struktur birokrasi yang baik kerja para petugas akan semakin terarah dan bisa diawasi dengan mudah. Kenyataan di lapangan sebenarnya prosedur pelaksanaan Program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) di Kelurahan Mugasari Kecamatan Semarang Selatan berjalan sesuai dengan prosedur. Dimulai dari tugas Kepala Kelurahan sebagai pelindung dan mengawasi jalannya program agar berjalan dengan baik di wilayah Kelurahan Mugasari. Tetapi hal ini tidak diimbangi dengan BKM (Badan

Keswadayaan Masyarakat) yang dirasa kurang oleh warga masyarakat dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai SOP yang ada pada Buku Pedoman PNPM Perkotaan.

B. REKOMENDASI

- Sosialisasi tentang program ke warga harus lebih ditingkatkan lagi, karena kebanyakan warga yang kurang mampu adalah mereka yang umumnya memiliki pendidikan rendah, sehingga perlu usaha keras dari para petugas untuk memberikan Informasi terkait program. Selama ini yang lebih banyak menentukan mengenai target yang harus dibantu adalah dari data di tingkat yang rendah yaitu RT. Akan lebih baik apabila petugas langsung terjun ke masyarakat, kemudian mendata dengan akurat. Selain mendata mereka juga harus menginformasikan ke warga. Baru kemudian nanti akan dikumpulkan di balai kelurahan untuk nantinya diberi penjelasan lebih lanjut.
- Untuk melaksanakan semua tugas itu yang diperlukan adalah mereka para petugas BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), LKM (Lembaga Keswadayaan

Masyarakat) dan Sukarelawan yang membantu jalannya program. Agar kebijakan Program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri di Kelurahan Mugasari Kecamatan Semarang Selatan bisa berjalan dengan baik dan sesuai target yang diharapkan, perlu didukung oleh kemampuan para petugasnya. Petugas adalah mereka yang akan langsung terjun ke masyarakat sehingga bukan hanya bersedia membantu, tetapi juga memiliki kemampuan yang sesuai. Karena nantinya masyarakat mendapatkan informasi juga dari para petugas tersebut.

- Pelaksana kebijakan harus mampu bekerja dengan berpedoman dengan buku Pedoman PNPM Mandiri Perkotaan karena disitu sudah tertulis dengan jelas yang harus dilakukan oleh para aktor kebijakan ini. Agar tujuan dari program ini dapat berjalan dengan baik juga diperlukan kesadaran yang tinggi antar petugas dengan tujuan satu yaitu untuk membantu masyarakat dengan cara pemberdayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara – Negara Berkembang : Model – Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik : Penjelasan, Analisis & Tranformasi Pikiran Nagel*. Yogyakarta: Balairung & Co.
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia Publishing.